

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



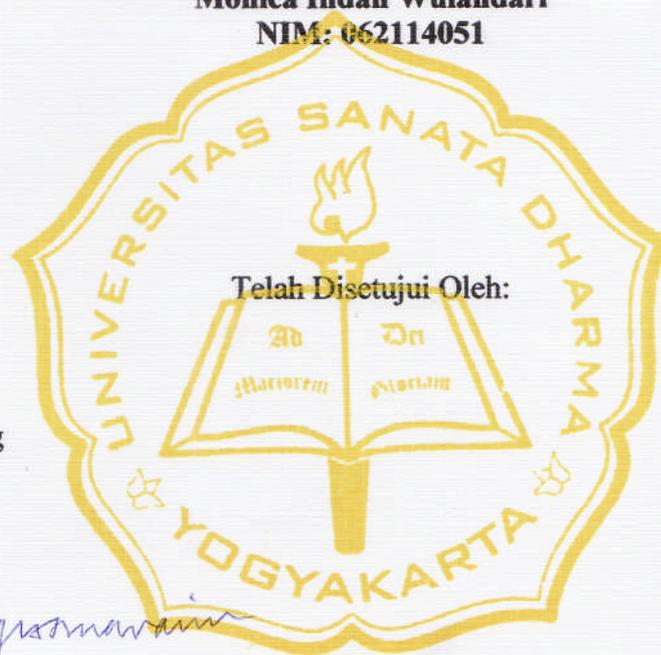
**Oleh :
Monica Indah Wulandari
NIM : 062114051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

Skripsi

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN**

Oleh:
Monica Indah Wulandari
NIM: 062114051



Pembimbing

Gien Agustinawansari

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 18 Juni 2010

Skripsi
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Monica Indah Wulandari

NIM: 062114051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 19 Juli 2010

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Anggota : M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan

Gien Agustinawansari
.....
Lisia Apriani
.....
Gien Agustinawansari
.....
M. Trisnawati Rahayu
.....
Drs. Yusef Widya Karsana
.....

Yogyakarta, 31 Juli 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Y.P. Supardiyono
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PERSEMBAHAN

Someone Special

*God has given me
the most special gift in my life
more valuable than gold and silver,
more precious than diamond and pearl
He has given me someone
who understands and cares
Someone I can count on
and always stand by my side
whenever I feel sad
Someone who always give me
courage, happiness, joy, and blessing.
Someone shares with me
both laughter and tears.
Someone who means so much
more than words could ever say.
Thank God that
someone special
is You*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria*
- ❖ *Bapak dan Ibu*
- ❖ *Kedua Kakakku: Mbak Ike dan Mas Devi*
- ❖ *Mas Uyan ku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*

MOTTO

“Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya”

-Markus 9: 23-

“Pertama-tama, katakan kepada dirimu apa yang akan kau raih; lalu lakukan apa yang perlu kau lakukan.”

Epictetus

Orang yang dapat menaklukkan kebimbangan dan ketakutan telah menaklukkan kegagalan

James Lane Allen

Bergembiralah karena Tuhan: maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu!

-Mazmur 37: 4-



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 19 Juli 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2010
Penulis

Monica Indah Wulandari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Monica Indah Wulandari

Nomor mahasiswa : 062114051

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

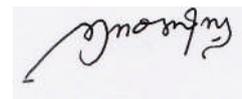
***ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN.***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2010

Yang menyatakan



Monica Indah Wulandari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan, Allah yang hidup dan perkasa. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia menciptakan keajaiban-keajaiban dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan sungguh Maha Bijaksana, karena kuasa dan uluran tangan-Nya membuat segala rencana kita dapat terlaksanakan. Dan berkat kasih-Nya yang tidak berkesudahan jugalah maka tugas penulisan skripsi ini dapat selesai.

Selama proses penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan mendukung baik mental maupun spiritual, pikiran maupun waktu. Oleh karena itu penulis menghargai segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan tersebut. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu mendampingi dan menyertaiku melalui berkat dan kuasa Nya dalam kehidupanku.
2. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya, terutama terima kasih karena kesabarannya untuk membaca dan membaca kembali skripsi ini dan selalu memberi saran untuk membuatnya menjadi lebih baik.

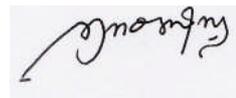
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah menunjukkan padaku segudang ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi.
6. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Lely bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang telah membantu selama proses penelitian berlangsung.
8. Seluruh responden yang telah mengisi kuesioner peneliti.
9. Bapak dan Ibu yang telah mendorongku untuk mempertahankan mimpi-mimpiku dan menunjukkan padaku untuk tidak terpengaruh oleh rintangan.
Terima kasih untuk cinta, doa dan pengorbanan tiada akhir.
10. Kedua kakakku, Mbak Ike dan Mas Devi yang selalu memberi semangat, kebahagiaan dan doa bagiku.
11. Mbah Kakung dan Simak di surga, terima kasih untuk kenangan indah bersama. Kalian akan selalu terus hidup dalam hatiku.
12. Pak Uwo, Mbok Uwo, Bulek Nuk dan Mas Tomo, terima kasih untuk doanya.
13. Yoga-Yogi, terima kasih untuk keceriaan yang kalian bagi denganku (walaupun terkadang membuatku jengkel). Jadi anak-anak yang baik ya.
14. Fauzan Widayanto yang selama ini telah memberi dukungan, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih telah masuk dalam hidupku dan memberi pelangi yang indah dalam hidupku.

15. Hayu and Rani: *Thanks for being good friends, I hope as we go on, we'll remember all the times we had together and as our lives changes, we will still be friends forever.*
16. Uun, Fani, Rini, Nana dan Frans yang telah mewarnai hidupku. Hari-hari yang kulalui bersama kalian adalah hari-hari yang akan aku rindukan di tahun-tahun mendatang.
17. Teman-teman seperjuangan MPT: Puspa, Efri, Wasis, Lia, Bella, Mike, Liani, Mas Ben, Wisnu, Lusi, Gita, Veni dan Mbak Nana.
18. Teman-teman seperjuangan “angkatan 2006”, terutama kelas B. Terima kasih atas keceriaan dan kebersamaannya saat aku bergelut dengan dunia kuliah.
19. Semua teman lama dan baru, semua sanak saudara. Maaf kalau belum ketulis.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan dalam menyusun skripsi.

Yogyakarta, 25 Juni 2010

Penulis



Monica Indah Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6

Bab II Tinjauan Pustaka	8
A. Pemahaman Tentang Perpajakan.....	8
1. Definisi dan Unsur Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
B. Pajak Penghasilan	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	11
3. Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan	12
4. Objek Pajak Penghasilan	13
5. Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan.....	16
C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	19
1. Kewajiban Wajib Pajak.....	19
2. Hak-hak Wajib Pajak	20
D. Kepatuhan Wajib Pajak	21
1. Pengertian Kepatuhan Pajak.....	21
2. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	22
3. Keuntungan Wajib Pajak Patuh.....	24
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	25
E. Sikap Manusia.....	26
1. Struktur Sikap dan Pembentukannya	27
2. Ciri-ciri Sikap.....	31
F. Kelompok Acuan (Pengaruh Orang Lain).....	31

G. Kewajiban Moral	32
1. Definisi Moral	32
2. Pembentukan Norma Moral	33
H. Hipotesis Penelitian	34
Bab III Metode Penelitian	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Waktu Penelitian.....	35
C. Tempat Penelitian	35
D. Subyek dan Obyek Penelitian	35
E. Data Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Pengukuran Variabel.....	36
H. Populasi dan Sampel.....	37
I. Teknik Pengujian Instrumen.....	38
J. Teknik Analisis Data	40
Bab IV Gambaran Umum Responden	47
A. Gambaran Penyebaran Kuesioner	47
B. Usia Responden.....	47
C. Jenis Kelamin Responden	48
D. Pendidikan Terakhir Responden	49
E. Pekerjaan Responden	50
F. Penghasilan Responden.....	51
G. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	52

H. Tahun Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	54
Bab V Analisis Data dan Pembahasan	56
A. Analisis Data	56
1. Uji Validitas dan Reliabilitas	56
2. Analisis Regresi.....	58
3. Uji Asumsi Klasik	60
4. Pengujian Hipotesis.....	62
5. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	65
B. Pembahasan	76
Bab VI Penutup.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Keterbatasan Penelitian	87
C. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Penilaian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan.....	41
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan	52
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).....	53
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Tahun Perolehan (Nomor Pokok Wajib Pajak).....	54
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 5.2 Hasil Koefisien Regresi Berganda.....	59
Tabel 5.3 Hasil Analisis Regresi Berganda	59
Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	60
Tabel 5.5 Hasil Koefisiensi Multikolonieritas.....	61
Tabel 5.6 Kesimpulan Untuk Menjawab Rumusan Masalah	66
Tabel 5.7 Skor dan Penilaian Kepatuhan Pajak.....	67
Tabel 5.8 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Usia.....	67

Tabel 5.9	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 5.10	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
Tabel 5.11	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pekerjaan.....	71
Tabel 5.12	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jumlah Penghasilan.....	72
Tabel 5.13	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	74
Tabel 5.14	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tahun Perolehan NPWP	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konsepsi Skematik Mengenai Sikap.....	29
Gambar 5.1 Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas	62
Gambar 5.2 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 1)	63
Gambar 5.3 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 2)	64
Gambar 5.4 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 3)	65

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN

Monica Indah Wulandari
NIM: 062114051
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilaksanakan di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dengan jumlah responden yaitu 90 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipilih berdasarkan kriteria dari sampel.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) analisis penilaian acuan norma (PAN) tipe II yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan; (2) analisis regresi berganda, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua diajukan beberapa rumusan hipotesis yang akan di uji signifikansinya dengan menggunakan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sebagian besar dari wajib pajak memiliki skor 37 sampai dengan 52 dengan jumlah 64 orang atau sebesar 71,11% cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. (2) Ada pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, sedangkan faktor kelompok acuan dan kewajiban moral tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF COMPLIANCE LEVEL OF PERSONAL TAXPAYER IN DOING OBLIGATION OF INCOME TAX

Monica Indah Wulandari
NIM : 062114051
University of Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

This research aimed to know: (1) the compliance of personal taxpayer in doing obligation of income tax; (2) the factors influencing disobedience of personal people taxpayer. The research was done at the Office of Yogyakarta One Tax Service with 90 Personal Taxpayers as respondent which were selected based on criterion of sample.

The type of research was case study. The technique of data collecting used was questionnaire. The data analysis techniques used in this research were: (1) analysis assessment of norm reference (PAN) type II used to know the level compliance of personal taxpayer in doing obligation of income tax; (2) multiple regression analysis, while to answer the second problem there were hypotheses which their significance would be tested using t test.

The result of research indicated that: (1) the level compliance of personal taxpayer in doing obligation of income tax was most of taxpayers had score 37 up to 52 with amount 64 people or equal to 71,11% was obedience enough in doing obligation of income tax. (2) There was influence of attitude on disobedience of personal taxpayer in doing obligation of income tax, while reference group factor and moral obligation did not show any existence of influence to disobedience of personal taxpayer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial. Undang-Undang pajak, sebagai bagian hukum suatu negara yang mengikat warga negaranya sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan mempunyai 3 sumber penerimaan pokok, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber yang tersebut di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela.

Reformasi pajak diupayakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dengan nominal besar melainkan wajib pajak yang

mengerti mengenai hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Adapun manfaat yang bisa didapat adalah wajib pajak akan memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak (Gardina, 2006: 11).

Tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai dengan aturan disinyalir pada umumnya masih rendah meskipun hal ini masih dapat diperdebatkan. Satu hal yang dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut ditunjukkan oleh besaran *tax coverage ratio*, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Besaran tersebut merupakan perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dipungut (Gunadi, 2001: 22).

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri wajib pajak sendiri serta kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Untuk itu sangat perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral. Faktor-faktor tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Sehubung dengan latar belakang tersebut, peneliti memadang bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan penting untuk diteliti guna untuk mengurangi

wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dikaji adalah:

1. Apakah wajib pajak orang pribadi telah mematuhi ketentuan perpajakan dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya?
2. Apakah faktor sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan?

C. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian tidak terlalu luas dan dapat menjawab permasalahan yang ada, maka masalah akan dibatasi pada:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pajak Penghasilan) dalam melakukan kewajiban perpajakannya diukur berdasarkan ketepatan waktu mereka membayar, penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa, tidak pernah menunggak pajak, tidak pernah melakukan tindakan pidana perpajakan, dan SPT diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri (faktor pribadi) maupun faktor dari luar wajib pajak (lingkungan sekitar wajib pajak). Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di batasi pada faktor pribadi yang berhubungan dengan wajib pajak yaitu sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi aparatur pajak mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak yang berminat terhadap topik perpajakan.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui secara langsung mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini merupakan pengetahuan tambahan bagi penulis selain teori yang dipelajari dibangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, populasi dan sampel, seras teknik dan analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Responden

Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat gambaran responden yang dijadikan sampel penelitian.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab analisis data dan pembahasan akan dijelaskan mengenai teknik analisis data beserta pembahasannya.

Bab VI Penutup

Pada bab penutup akan disimpulkan hasil dari analisis data penelitian, pembahasan dari hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Tentang Perpajakan

1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990: 5) menyatakan: "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Waluyo, 2008: 6), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008: 16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal

tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2008: 17):

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.

(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini memberikan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Casavera, 2009: 78).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Casavera, 2009: 78).

Subjek pajak meliputi :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

c. Badan, dan

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan tahun 2008 adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan kosulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama

mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
- d. Pejabat-pejabat perakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Casavera, 2009: 84).

Objek pajak antara lain meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali dalam undang-undang pajak penghasilan.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanpa turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q. Penghasilan dari usaha syariah.

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai keputusan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan tahun 2008 adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 (b) sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keterangan keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2009: 1) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu sikap/perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2009: 2) ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya tentang batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3) adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya.

Dalam studi kepatuhan pajak, terdapat dua model utama yang menjelaskan tingkat kepatuhan pajak (Santoso, 2008: 88), yaitu:

a. Model Konvensional (Model Generasi Pertama)

Model konvensional lebih menekankan persoalan *tax evasion* dari sisi wajib pajak (*taxprayers*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya.

b. Model Generasi Kedua

Dalam model generasi kedua, persoalan kepatuhan pajak juga ditentukan oleh pelaku lain, yaitu petugas pajak (*taxcollector*). Dalam model generasi kedua, analisis dilakukan pada pola perilaku kedua belah pihak secara bersamaan untuk mengetahui respon mereka bila terjadi perubahan tarif pajak, tingkat kemungkinan untuk terdeteksi, tingkat penalti, dan sistem bonus bagi petugas pajak.

2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah

memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Gardina, 2006: 12).

Adapun kriteria-kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/pj./2008 adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada nomor (2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan

tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
 - (1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - (2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3. Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh

Bagi wajib pajak yang dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, maka akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat memperoleh hak atas restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan dua bulan untuk pajak penghasilan (PPh) tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian dari Mustikasari, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak patuh wajib pajak terdiri dari variabel sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral.

a. Sikap

Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

b. Norma subyektif

Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subyektif merupakan fungsi harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.

c. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini wajib pajak yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

d. Kewajiban moral

Kewajiban moral adalah norma individu yang dipunyai oleh seseorang. Adanya kewajiban moral akan mendorong seseorang untuk patuh dalam kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan terdiri dari sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral. Ketiga variabel tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

E. Sikap Manusia

Sikap manusia merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang sebagai bentuk evaluasi atau reaksi emosional gejala tertentu. Menanggapi munculnya gejala dalam kehidupan masyarakat, seseorang dapat menunjukkan sikapnya kearah positif atau negatif, tergantung faktor-faktor yang membentuknya, baik yang berasal dari dalam diri manusia maupun faktor dari luar diri manusia.

Menurut Thurstone (Walgito, 1991: 107) sikap adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek-objek psikologi yang berupa simbol-simbol, kata-kata, slogan-slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya.

Menurut La Pierre (Azwar, 2007: 5) sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam

situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa sikap sebagai suatu kecenderungan pola perilaku menolak (negatif) atau menerima (positif) yang dimiliki oleh seseorang terhadap stimuli-stimuli yang berada dilingkungan sekitarnya.

Pembahasan mengenai sikap dapat erat kaitannya dengan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga telah banyak dipelajari. Ditinjau dari segi pentingnya masalah sikap pada tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari, sikap merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola berpikir individu dalam kesehariannya terutama dalam pengambilan keputusan. Saat sikap telah terbentuk, maka sikap akan menentukan cara-cara berperilaku terhadap obyek tertentu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sikap tersebut. Selanjutnya sikap akan memberikan corak pada tingkah laku seseorang maupun kelompok.

1. Struktur Sikap dan Pembentukannya

a. Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang (Wibowo, 2009: 83), yaitu:

1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif berisi semua pemikiran serta ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap. Isi pemikiran seseorang meliputi

hal-hal yang diketahuinya sekitar objek sikap, dapat berupa tanggapan atau keyakinan, kesan, atribusi, dan penilaian tentang objek sikap tadi.

2) Komponen Afektif

Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap, dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penilaian seseorang terhadap objek sikap inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan atau kekuatan/daya.

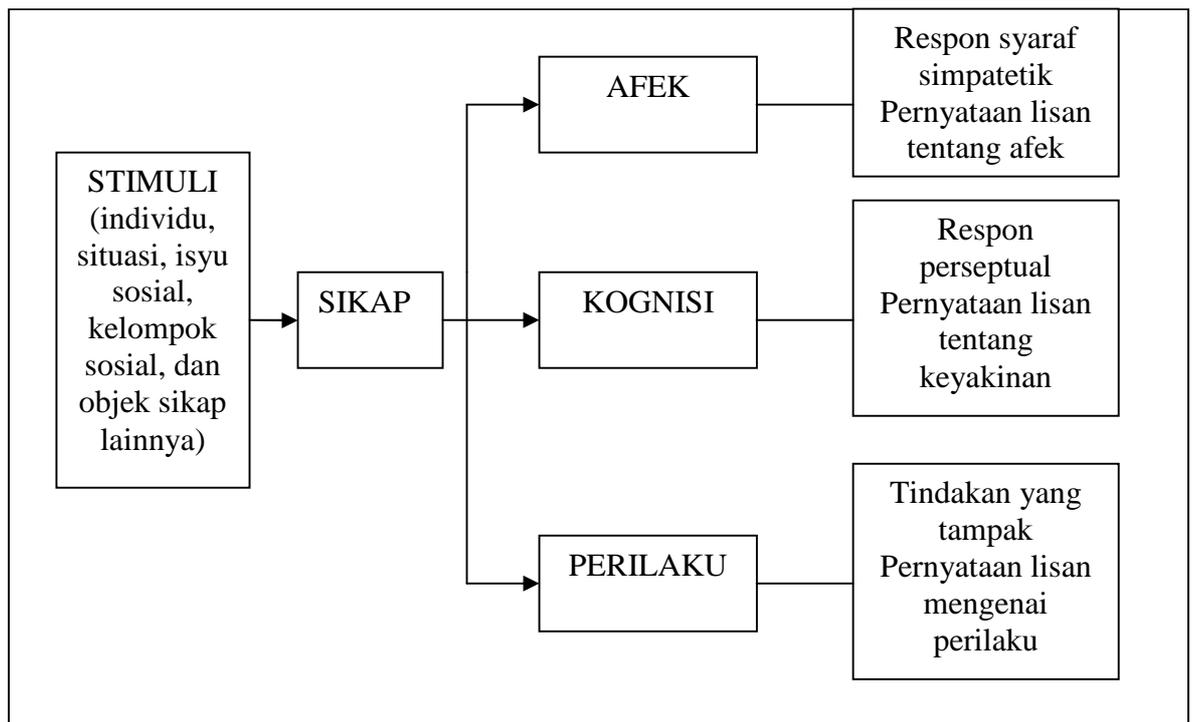
3) Komponen Perilaku

Komponen perilaku dapat diketahui melalui respon subjek yang berkenaan dengan objek sikap. Respon yang dimaksud dapat berupa tindakan atau perbuatan yang dapat diamati dan dapat berupa intensi atau niat untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap. Intensi merupakan predisposisi atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek sikap.

Menurut Rosenberg dan Hovland (Azwar, 2007: 7) sikap seseorang terhadap suatu objek selalu berperan sebagai perantara antara responnya dan objek yang bersangkutan. Respon diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respon kognitif (respon perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), respon afektif (respon syaraf simpatetik dan pernyataan afeksi), serta respon perilaku

atau konatif (respon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Masing-masing klasifikasi respon ini berhubungan dengan ketiga komponen sikap.

Berikut konsepsi skematik mengenai sikap menurut Rosenberg dan Hovland.



Gambar 2.1: Konsepsi Skematik Mengenai Sikap (Saifuddin Azwar, 2005:8)

b. Pembentukan Sikap

Sikap manusia bukan sesuatu yang melekat sejak ia lahir, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan hidupnya. Sikap dibentuk melalui proses belajar sosial, yaitu proses dimana individu memperoleh informasi, tingkah laku, atau sikap baru dari orang lain.

Menurut Wibowo (2009: 83) sikap dibentuk melalui empat pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Pengkondisian klasik (*classical conditioning: learning based on association*)

Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu stimulus/rangsangan selalu diikuti oleh stimulus/rangsangan yang lain, sehingga yang pertama menjadi suatu isyarat bagi rangsangan yang kedua.

- 2) Pengkondisian instrumental (*instrumental conditioning*)

Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Sebaliknya, bila perilaku mendatangkan hasil yang tidak menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut tidak akan diulang lagi atau dihindari.

- 3) Belajar melalui pengamatan (*observational learning, learning by example*)

Proses pembelajaran dengan cara mengamati perilaku orang lain, kemudian dijadikan sebagai contoh untuk berperilaku serupa. Banyak perilaku yang dilakukan seseorang hanya karena mengamati perbuatan orang lain.

- 4) Perbandingan sosial (*social comparison*)

Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek apakah pandangan kita mengenai sesuatu hal adalah benar atau salah disebut perbandingan sosial. Kita cenderung

menyamakan diri kita dengan mengambil ide-ide dan sikap-sikap orang lain.

2. Ciri-ciri Sikap

Menurut Walgito (1991: 113) ciri-ciri sikap dijabarkan dalam 5 ciri yaitu :

- a. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir melainkan sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu yang bersangkutan.
- b. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Oleh karena itu, sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap objek tersebut.
- c. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek.
- d. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar
- e. Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi.

F. Kelompok Acuan (Pengaruh Orang Lain)

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku sosial. Dalam hal ini kelompok acuan adalah satu atau lebih orang di sekitar individu (misalnya saudara, teman sejawat). Begitu pentingnya kelompok Acuan (setiap orang/kelompok yang menjadi model atau penuntun bagi keputusan dan tindakan seseorang) bagi setiap individu dalam

masyarakat akan cenderung menentukan nilai-nilai keimanan, konsep diri maupun kekuatan egonya .

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki perilaku yang konformis atau searah dengan perilaku orang lain yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut (Azwar, 2007: 32).

G. Kewajiban Moral

1. Definisi Moral

Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Mustikasari (2007: 6) kewajiban moral dalam perpajakan adalah norma individu yang dipunyai oleh seorang wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh wajib pajak yang lain.

Menurut Chang (2000:87) ada tiga fungsi eksplisit norma moral dalam kehidupan manusia, yaitu:

- a. Norma moral berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama.
- b. Norma moral menarik perhatian kita kepada masalah-masalah moral yang kurang ditanggapi manusia. Norma ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

- c. Norma-norma moral dapat menarik perhatian manusia kepada gejala "pembiasaan emosional". Maksudnya, norma ini dapat menuntun manusia kepada faktor-faktor emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu.

2. Pembentukan Norma Moral

Menurut Chang (2000:91), ada dua teori mengenai pembentukan norma moral, teori tersebut antara lain:

a. *Teori Deontologi ("deon" = kewajiban)*

Menurut pendekatan deontologis, norma moral menjadi acuan utama penentu benar atau salahnya tindakan manusia. Posisi teori ini mengingatkan bahwa ada sejumlah tindakan yang selalu dan dimanapun juga jahat di dalam dirinya. Jika tindakan-tindakan itu dijadikan norma moral, norma itu akan menjadi tolak ukur untuk menilai tindakan seseorang apakah baik atau jahat secara moral.

b. *Teori Teleologis ("telos" = tujuan)*

Teori ini menyatakan bahwa baik atau tidaknya suatu tindakan tergantung dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Semua pertimbangan atas tindakan manusiawi bertitik tolak dari kriteria ini. Sejauh akibat baik atau positif melebihi akibat negatif, maka secara etis tindakan itu dianggap benar.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2003: 47). Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya serta faktor-faktor (sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral) yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilannya. Hal tersebut karena dipengaruhi faktor sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral.

Hipotesis untuk faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- H₁ : Sikap mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.
- H₂ : Kelompok acuan mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.
- H₃ : Kewajiban moral mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi kasus yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti. Tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2010.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
- b. Objek penelitian adalah pajak penghasilan orang pribadi, sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral.

E. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari responden dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak, sikap, kelompok acuan serta kewajiban moral yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Kuesioner yang disebarakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner yang disebarakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk mendapatkan data tentang responden, dan bagian kedua yang berisikan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian.

G. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dengan menggunakan skala Likert yang menunjuk pada suatu pertanyaan mengenai tingkat kesetujuan atau

ketidaksetujuan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan memberikan skala pada masing-masing point jawaban sebagai berikut:

1. SS merupakan jawaban Sangat Setuju diberi skor 4.
2. S merupakan jawaban Setuju diberi skor 3.
3. TS merupakan jawaban Tidak Setuju diberi skor 2.
4. STS merupakan jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1.

H. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas (*finite*) maupun tidak terbatas (*infinite*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak – Pajak Penghasilan orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dari metode *nonprobability sampling*. Pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dilakukan dengan menetapkan beberapa kriteria bagi sampel (Kuncoro, 2003: 120). Adapun kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi.

- b. Responden yang dituju adalah wajib pajak yang mudah dijangkau oleh peneliti.
- c. Wajib pajak tersebut berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

I. Teknik Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Kuncoro (2003:151) suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengungkapkan keadaan suatu faktor disusun sejumlah pertanyaan yang disebut dengan butir atau indikator, sedangkan faktor atau variabel penelitian yang dilihat tersebut dinamakan sebagai konstruk.

Cara yang paling sederhana untuk mengetahui validitas suatu kuesioner yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk menggunakan program SPSS, dimana penghitungan besarnya korelasi menggunakan rumus korelasi Karl Pearson. Setelah diketahui hasilnya, validitas suatu pertanyaan dalam kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat signifikan koefisien korelasi tersebut dengan taraf signifikan yang

ditentukan, apabila hasilnya lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan maka setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid (Ghozali, 2005: 47). Berikut ini rumus korelasi *product moment* Karl Pearson (Sugiyono, 2005: 182) :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi setiap pertanyaan

X = Skor tiap item pertanyaan

Y = Skor seluruh pertanyaan (total variabel)

n = jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Apabila alat ukur telah dinyatakan valid, maka alat ukur tersebut dapat diukur reliabilitasnya, dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah ganjil-genap. Formula Spearman-Brown adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 359) :

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi *Product Moment* antara belahan pertama dan kedua

Apabila $r_i > r_{\text{tabel}}$, maka instrumen atau alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

J. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung Mean

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

Σx = Nilai kuantitatif total variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

b. Menghitung Standar Deviasi

$$s = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

S = Standar Deviasi

N = Jumlah Responden

X = Nilai/Poin

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan suatu penilaian. Dalam melakukan penilaian dalam usaha menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan Penilaian

Acuan Norma (PAN) II. Penilaian ini memberikan range berdasarkan nilai mean dan standar deviasi yang telah ditentukan, kesimpulan yang diambil untuk menjawab masalah yang pertama ialah menggunakan kriteria sebagai berikut (Masidjo, 1995: 160) :

Tabel 3.1 Penilaian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden $(X) > \bar{X} + SI$	Sangat Patuh
$\bar{X} - SI < \text{Total skor tiap responden } (X) < \bar{X} + SI$	Cukup Patuh
Total skor tiap responden $(X) < \bar{X} - SI$	Kurang Patuh

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral) dengan variabel terikat (ketidapatuhan pajak).

Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = Sikap

X_2 = Kelompok Acuan

X_3 = Kewajiban Moral

b. Uji Asumsi Klasik

Agar dihasilkan model regresi linier ganda yang tidak bias maka harus memenuhi beberapa asumsi klasik, tetapi karena penelitian ini menggunakan data *crosssection*, maka pengujian autokorelasi tidak dapat dilakukan hal ini dikarenakan autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain dan hal ini terjadi pada data *time series* bukan pada *crosssection* (Ghozali, 2005: 95). Maka pengujian yang dilakukan yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menguji normalitas residual digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2005: 144):

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut:

Jika $P\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak

Jika $P\text{-value} \geq \alpha$, maka H_0 diterima

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lain (Nugroho, 2005: 58).

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/ Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2005: 91).

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentize Delete Residual* nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier tidak terdapat heteroskedastisitas jika (Nugroho, 2005: 62):

- a) Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
 - b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
 - c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
 - d) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
- c. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan ditemukan persamaan regresi yang tidak bias, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang telah di rumuskan sebelumnya.

Untuk melakukan pengujian hipotesis pertama sampai dengan ketiga, yang hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t. Dengan rumus hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = 0$, Sikap tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

$H_0 : b_2 = 0$, Kelompok acuan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

$H_0 : b_3 = 0$, Kewajiban moral tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

$H_a : b_1 \neq 0$, Sikap mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

$H_a : b_2 \neq 0$, Kelompok acuan mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

$H_a : b_3 \neq 0$, Kewajiban moral mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Untuk mencari t hitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$t_o = \frac{b}{S_b}$$

dimana

$$S_b = \sqrt{\frac{\frac{1}{n-1} \sum (Y_i - Y'')^2}{\sum (X_i - X)}}$$

Keterangan :

b = koefisien regresi

S_b = standard error koefisien regresi

Dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% dan derajat kebebasan (dk) sebesar n-1. Dengan kriteria Pengujian sebagai berikut:

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H₀ diterima

Jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H₀ ditolak

BAB IV

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

A. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Jumlah sampel yang telah diambil adalah 100 responden. Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu ini meliputi wilayah yang berada di kotamadya Yogyakarta. Dengan menggunakan sumber data primer yang dihasilkan oleh kuesioner diperoleh data pribadi responden. Adapun data pribadi responden meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah penghasilan, kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan tahun perolehan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dari 100 kuesioner yang disebarakan hanya 90 kuesioner yang kembali atau tingkat pengembalian kuesioner sebesar 90%, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

B. Usia Responden

Dari 100 kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan usia, antara lain:

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30 tahun	25	27,78
31 – 40 tahun	20	22,22
41 – 50 tahun	27	30
51 – 60 tahun	18	20
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.1 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan usia, usia responden 20 – 30 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 27,78%, usia responden 31 – 40 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 22,22%, usia 41 – 50 tahun berjumlah 27 orang atau sebesar 30%, dan usia 51 – 60 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 20%. Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang ada jumlah usia yang paling banyak dimiliki responden adalah usia 41 – 50 tahun dengan jumlah 27 orang atau sebesar 30%.

C. Jenis Kelamin Responden

Dari 100 kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan jenis kelamin, antara lain:

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	55	61,11
Perempuan	35	38,89
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 90 responden, responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 orang atau sebesar 61,11% dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 35 orang atau 38,89%. Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang ada jumlah jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki.

D. Pendidikan Terakhir Responden

Dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan, antara lain:

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SLTP/SMP	6	6,67
SLTA/SMA	17	18,89
D-3/Akademika	14	15,55
Jenjang S-1	44	48,89
Jenjang S-2	6	6,67
Lain-lain	3	3,33
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan 90 responden yang terbagi menjadi 6 kelompok tingkat pendidikan diperoleh komposisi sebagai berikut: responden dengan tingkat pendidikan SLTP/SMP berjumlah 6 orang atau 6,67%, responden dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA berjumlah 17 orang atau sebesar 18,89%, responden dengan tingkat pendidikan D-3/akademika berjumlah 14 orang atau sebesar 15,55%, responden dengan tingkat pendidikan S-1 berjumlah 44 orang atau sebesar 48,89%, responden dengan tingkat pendidikan S-2 berjumlah 6 orang atau sebesar 6,67%, dan lain-lain berjumlah 3 orang atau sebesar 3,33%. Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang paling banyak dijumpai adalah responden dengan tingkat pendidikan S-1 yaitu berjumlah 44 orang atau sebesar 48,89%.

E. Pekerjaan Responden

Dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan pekerjaan, antara lain:

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
PNS	22	24,44
Karyawan Swasta	40	44,45
Wiraswasta	23	25,56
Lain-Lain:		
- Pensiunan	4	4,44
- <i>Freelance Designer</i>	1	1,11
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Menurut pengelompokan responden berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 22 orang atau sebesar 24,44%, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 40 orang atau sebesar 44,45%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 23 atau sebesar 25,56%, dan lain-lain berjumlah 5 orang atau sebesar 5,55% dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: responden yang berstatus sebagai pensiunan berjumlah 4 orang atau sebesar 4,44% dan responden yang bekerja sebagai *freelance designer* berjumlah 1 orang atau sebesar 1,11%. Dari table 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang ada jenis pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah sebagai karyawan swasta yang berjumlah 40 orang atau sebesar 44,45%.

F. Penghasilan Responden

Dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor

Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan, antara lain:

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan

Tingkat Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp1.500.000	13	14,44
Rp1.500.000 – Rp3.000.000	50	55,56
Rp3.000.000 – Rp5.000.000	16	17,78
Rp5.000.000 – Rp7.000.000	8	8,89
Rp7.000.000 – Rp9.000.000	3	3,33
> Rp9.000.000	-	-
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan 90 responden yang terbagi menjadi 6 kelompok tingkat penghasilan, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp1.500.000 berjumlah 13 orang atau sebesar 14,44%, responden yang memiliki penghasilan Rp1.500.000 – Rp3.000.000 berjumlah 50 orang atau sebesar 55,56%, responden yang memiliki penghasilan Rp3.000.000 – Rp5.000.000 berjumlah 16 orang atau sebesar 17,78%, responden yang memiliki penghasilan Rp5.000.000 – Rp7.000.000 berjumlah 8 orang atau sebesar 8,89%, responden yang memiliki penghasilan Rp7.000.000 – Rp9.000.000 berjumlah 3 orang atau sebesar 3,33%, dan untuk penghasilan diatas Rp9.000.000 berjumlah 0 karena tidak ada responden yang memiliki penghasilan diatas Rp9.000.000. Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang ada tingkat penghasilan yang paling banyak dimiliki responden yaitu sebesar Rp1.500.000 – Rp3.000.000 yang berjumlah 50 orang atau sebesar 55,56%.

G. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2008: 23). Dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 90 responden dapat diketahui responden yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan jumlah responden yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sudah memiliki NPWP	69	76,67
Belum memiliki NPWP	21	23,33
Total	90	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.6 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yaitu sudah memiliki NPWP atau belum. Dari 90 responden yang ada sebagian besar responden sudah memiliki NPWP dengan jumlah 69 orang atau sebesar 76,67%, sedangkan yang belum memiliki NPWP berjumlah 21 orang atau sebesar 23,33%. Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sudah memiliki NPWP lebih banyak dibandingkan responden yang belum memiliki NPWP.

H. Tahun Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dari 100 kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak hanya 90 kuesioner yang kembali, maka dari 90 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran wajib pajak orang pribadi yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Dari 69 responden yang sudah memiliki NPWP dapat diketahui data wajib pajak berdasarkan tahun perolehan nomor pokok wajib pajak (NPWP), antara lain:

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Tahun Perolehan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Tahun Perolehan NPWP	Frekuensi	Persentase (%)
Sebelum tahun 2006	12	17,39
2006	7	10,14
2007	9	13,04
2008	22	31,89
2009	19	27,54
2010	-	-
Total	69	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan 69 responden yang telah memiliki NPWP, maka dapat diketahui tahun perolehan NPWP yaitu sebagai berikut: responden yang sudah memiliki NPWP sebelum tahun 2006 berjumlah 12 orang atau sebesar 17,39%, responden yang memiliki NPWP pada tahun 2006 berjumlah 7 orang atau sebesar 10,14%, responden yang memiliki NPWP pada tahun 2007 berjumlah 9 orang atau sebesar 13,04%, responden yang memiliki NPWP pada tahun 2008 berjumlah 22 orang atau sebesar 31,89%, responden yang memiliki NPWP pada tahun 2009 berjumlah 19 orang atau sebesar 27,54%, dan responden yang memiliki NPWP pada tahun 2010 berjumlah 0 karena tidak ada responden yang memiliki NPWP pada tahun 2010. Dari tabel 4.7

dapat disimpulkan bahwa tahun perolehan NPWP yang paling banyak yaitu pada tahun 2008 dengan jumlah 22 orang atau 31,89%.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengujian yang telah dilakukan. Pengujian meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.

A. Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Kuesioner yang disebarakan sejumlah 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner yang disebarakan hanya 90 kuesioner yang kembali atau dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 90%. Kuesioner terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian I berisi data responden yang akan digunakan untuk mengetahui karakteristik responden dan bagian II berisi pernyataan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral.

a. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Pearson yang telah dibahas pada bab terdahulu. Validitas suatu butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian validitas menggunakan piranti lunak SPSS.

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	Signifikan	Keterangan	Pertanyaan	Signifikan	Keterangan
1a	0	Valid	5c	0	Valid
1b	0	Valid	5d	0	Valid
1c	0	Valid	5e	0	Valid
2a	0	Valid	5f	0	Valid
2b	0	Valid	6a	0	Valid
2c	0	Valid	6b	0	Valid
3a	0	Valid	6c	0	Valid
3b	0	Valid	6d	0	Valid
3c	0	Valid	7a	0	Valid
4a	0	Valid	7b	0	Valid
4b	0	Valid	8a	0	Valid
4c	0	Valid	8b	0	Valid
5a	0	Valid	9a	0	Valid
5b	0	Valid	9b	0	Valid

Validitas suatu butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur oleh kuesioner tersebut dapat dilihat dari hasil output SPSS diatas. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner valid apabila korelasi antara setiap butir pertanyaan dalam kuesioner terhadap total skornya menunjukkan hasil yang signifikan (Ghozali, 2005:47). Dari hasil output SPSS diatas dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas suatu instrumen dimaksudkan untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan dua kali

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian reliabilitas terhadap 28 butir pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah ganjil-genap.

Rumusnya adalah (Sugiyono, 2008: 359) :

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Dalam mengukur reliabilitas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dihitung menggunakan alat ukur SPSS 16.0 dan diperoleh hasil yaitu r-hitung sebesar 0,823. Untuk mencari r_i digunakan rumus Spearman-Brown,

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

$$r_i = \frac{2 \cdot 0,823}{1 + 0,823}$$

$$r_i = 0,9023$$

Dari hasil diatas diperoleh hasil bahwa $r_i = 0,9023 > r\text{-hitung} = 0,823$.

Jadi, setiap butir pernyataan dalam kuesioner *reliabel*.

2. Analisis Regresi

Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas maka tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Koefisien Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.235	.208	6.854

a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Kelompok Acuan, Sikap
Sumber: Output SPSS

Tabel 5.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.678	4.533		14.268	.000
	Sikap	-.785	.352	-.335	-2.230	.028
	Kelp.Acuan	-.011	.448	-.004	-.025	.980
	Kew.Moral	-.509	.426	-.180	-1.197	.235

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak
Sumber: Output SPSS

Dari hasil output diatas persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 64.678 - 0,785 X_1 - 0,011 X_2 - 0,509 X_3$$

- Konstanta positif menunjukkan bahwa jika variabel independent dianggap 0, maka Y atau ketidakpatuhan wajib pajak positif atau baik.
- Koefisien regresi X_1 atau sikap wajib pajak yang negatif menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang memperlihatkan sikap positif terhadap pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi X_2 atau kelompok acuan wajib pajak yang negatif menunjukkan bahwa setiap pengaruh kelompok acuan yang baik (positif) terhadap wajib pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak.

- d. Koefisien regresi X_3 atau kewajiban moral wajib pajak yang negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kewajiban moral wajib pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak.

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam hasil persamaan regresi diatas mengandung beberapa asumsi sederhana yang sering disebut dengan asumsi klasik. Untuk menghasilkan persamaan regresi yang tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dari data yang ada diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.73710047
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		.308

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS

Pada tabel hasil output SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,966 dan tidak signifikan pada 0,05

(karena $p = 0,308 >$ dari $0,05$). Jadi, tidak dapat menolak H_0 yang mengatakan bahwa residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Dalam menguji ada tidaknya multikolonieritas dalam persamaan regresi tersebut adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.5 Hasil Koefisiensi Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	64.678	4.533		14.268	.000		
Sikap	-.785	.352	-.335	-2.230	.028	.394	2.537
Kelp.Acuan	-.011	.448	-.004	-.025	.980	.426	2.347
Kew.Moral	-.509	.426	-.180	-1.197	.235	.395	2.532

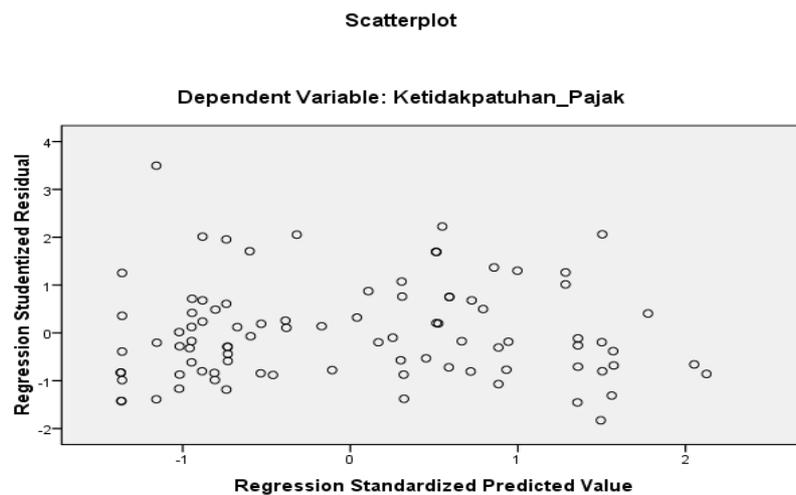
a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS

Hasil uji melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) pada hasil output SPSS tabel diatas, masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistik dan dapat digunakan dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Dari data yang ada diperoleh gambar sebagai berikut:



Gambar 5.1 Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Pengujian Hipotesis

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengujian hipotesis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam pengujian hipotesis ini akan menggunakan uji t.

Untuk pengujian hipotesis pertama sampai ketiga, pengujian akan dilakukan dengan uji t. Untuk memudahkan penghitungan, cara yang

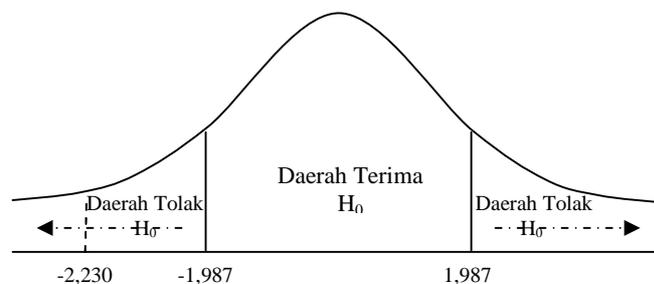
paling sederhana yaitu dengan melihat hasil perhitungan regresi. Tampilan output regresi dapat dilihat di halaman 59 (Tabel 5.3).

Untuk t tabel dengan derajat kebebasan sebesar 89 (n-1) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 adalah 1,987. Dari data tersebut pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama

H_0 tidak dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$; artinya Sikap tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

H_0 dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; artinya Sikap mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.



Gambar 5.2 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 1)

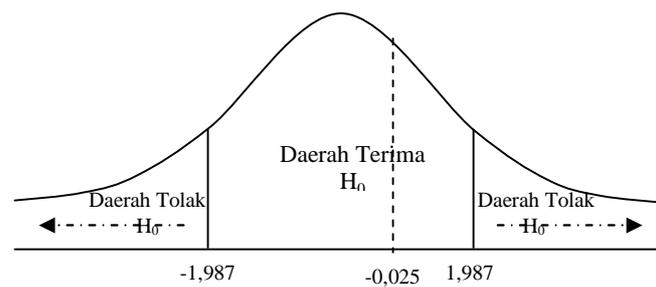
Karena $t_0 = -2,230$ dengan t tabel 1,987, maka t hitung terletak di daerah $-1,987 \geq -2,230 \geq 1,987$, sehingga h_0 ditolak dan h_a diterima, yang berarti bahwa sikap mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan

kewajiban pajak penghasilan.

b. Hipotesis Kedua

H_0 tidak dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$; artinya kelompok acuan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

H_0 dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; artinya kelompok acuan mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.



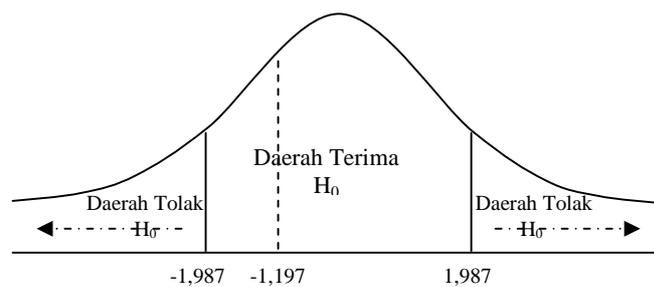
Gambar 5.3 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 2)

Karena $t_0 = -0,025$ dengan t tabel 1,987, maka t hitung terletak di daerah $-1,987 \leq -0,025 \leq 1,987$, sehingga h_0 diterima dan h_a ditolak, yang berarti bahwa kelompok acuan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

c. Hipotesis Ketiga

H_0 tidak dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$; artinya kewajiban moral tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

H_0 dapat ditolak; jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; artinya kewajiban moral mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.



Gambar 5.4 Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0 (Hipotesis 3)

Karena $t_0 = -1,197$ dengan t tabel 1,987, maka t hitung terletak di daerah $-1,987 \leq -1,197 \leq 1,987$, sehingga h_0 diterima dan h_a ditolak, yang berarti bahwa kewajiban moral tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

5. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan dari menganalisis data ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban pajak penghasilan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah

penghasilan, kepemilikan NPWP, dan berdasarkan tahun perolehan NPWP.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah wajib pajak orang pribadi telah mematuhi ketentuan perpajakan dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, maka penelitian menggunakan kuesioner ini dihitung dengan menggunakan perhitungan mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S). Hal ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian ini menggunakan range berdasarkan nilai mean dan (\bar{X}) dan standar deviasi (S).

Kriteria penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Kesimpulan Untuk Menjawab Rumusan Masalah

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + SI$	Sangat Patuh
$\bar{X} - SI < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + SI$	Cukup Patuh
Total skor tiap responden (X) < $\bar{X} - SI$	Kurang Patuh

Sumber: (Masidjo, 1995: 160)

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 2, maka kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Skor dan Penilaian Kepatuhan Pajak

Skor	Penilaian
Skor diatas 52	Sangat Patuh
Skor diantara 37 sampai dengan 52	Cukup Patuh
Skor dibawah 37	Kurang Patuh

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Usia

Tabel 5.8 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Usia

Usia \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
20 – 30 tahun	-	-	18	72	7	28	25
31 – 40 tahun	2	10	18	90	-	-	20
41 – 50 tahun	7	25,93	17	62,96	3	11,11	27
51 – 60 tahun	3	16,67	11	61,11	4	22,22	18
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari hasil penghitungan tabel diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan usia adalah sebagai berikut: wajib pajak dengan usia 20 tahun sampai 30 tahun, sebanyak 7 orang atau 28% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 18 orang atau 72% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

Wajib pajak dengan usia 31 tahun sampai 40 tahun, sebanyak 18 orang atau 90% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 10% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang

kurang patuh.

Wajib pajak dengan usia 41 tahun sampai 50 tahun, sebanyak 3 orang atau 11,11% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 17 orang atau 62,96% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 7 orang atau 25,93% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak dengan usia 51 tahun sampai 60 tahun, sebanyak 4 orang atau 22,22% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 11 orang atau 61,11% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 3 orang atau 16,67% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
Laki-laki	10	18,18	35	63,64	10	18,18	55
Perempuan	2	5,71	29	82,86	4	11,43	35
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut: untuk wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 10 orang atau 18,18% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 35 orang atau 63,64% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan

sebanyak 10 orang atau 18,18% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan, sebanyak 4 orang atau 11,43% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 29 orang atau 82,86% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 5,71% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.10 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
SLTP/SMP	1	16,67	5	83,33	-	-	6
SLTA/SMA	2	11,76	13	76,48	2	11,76	17
D-3/Akademika	3	21,43	10	71,43	1	7,14	14
Jenjang S-1	6	13,64	30	68,18	8	18,18	44
Jenjang S-2	-	-	3	50	3	50	6
Lain-lain	-	-	3	100	-	-	3
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan atas tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut: wajib pajak dengan tingkat pendidikan SLTP/SMP, sebanyak 5 orang atau 83,33% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 1 orang atau 16,67% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA, sebanyak 2 orang atau 11,76% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 13 orang atau 76,48% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 11,76% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan D-3/akademika, sebanyak 1 orang atau 7,14% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 10 orang atau 71,43% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 3 orang atau 21,43% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan S-1, sebanyak 8 orang atau 18,18% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 30 orang atau 68,13% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 6 orang atau 13,64% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan S-2, sebanyak 3 orang atau 50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 3 orang atau 50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh. Sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lain-lain sebanyak 3 orang atau 100% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

d. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5.11 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
PNS	-	-	18	81,82	4	18,18	22
Karyawan Swasta	2	5	33	82,50	5	12,50	40
Wiraswasta	10	43,48	9	39,13	4	17,39	23
Lain-Lain:							
- Pensiunan	-	-	3	75	1	25	4
- <i>Freelance Designer</i>	-	-	1	100	-	-	1
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pekerjaan, sebagai berikut: wajib pajak yang bekerja sebagai PNS, sebanyak 4 orang atau 18,18% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 18 orang atau 81,82% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

Wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan swasta, sebanyak 5 orang atau 12,50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 33 orang atau 82,50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 5% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta, sebanyak 4 orang atau 17,39% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 9 orang atau 39,13% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 10 orang atau 43,48% memiliki

tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang memiliki pekerjaan lain-lain, sebanyak 5 orang dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: wajib pajak yang berstatus pensiunan sebanyak 1 orang atau 25% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 3 orang atau 75% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh. Sedangkan wajib pajak yang bekerja sebagai *freelance designer* sebanyak 1 orang atau 100% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

e. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jumlah Penghasilan

Tabel 5.12 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Jumlah Penghasilan

Penghasilan \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
< Rp1.500.000	-	-	12	92,31	1	7,69	13
Rp1.500.000 – Rp3.000.000	2	4	39	78	9	18	50
Rp3.000.000 – Rp5.000.000	5	31,25	10	62,50	1	6,25	16
Rp5.000.000 – Rp7.000.000	4	50	1	12,50	3	37,50	8
Rp7.000.000 – Rp9.000.000	1	33,33	2	66,67	-	-	3
> Rp9.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan atas tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jumlah penghasilan, sebagai berikut: wajib pajak yang mempunyai penghasilan < Rp1.500.000, sebanyak 1 orang atau 7,69% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 12 orang atau 92,31% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp1.500.000 – Rp3.000.000, sebanyak 9 orang atau 18% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 39 orang atau 78% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 4% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp3.000.000 – Rp5.000.000, sebanyak 1 orang atau 6,25% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 10 orang atau 62,50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 5 orang atau 31,25% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp5.000.000 – Rp7.000.000, sebanyak 3 orang atau 37,50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 1 orang atau 12,50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 4 orang atau 50% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp7.000.000 – Rp9.000.000, sebanyak 2 orang atau 66,67% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 1 orang atau 33,33% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

f. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 5.13 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
Sudah memiliki NPWP	11	15,94	48	69,57	10	14,49	69
Belum memiliki NPWP	1	4,76	16	76,19	4	19,05	21
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai berikut: wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, sebanyak 10 orang atau 14,49% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 48 orang atau 69,57% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 11 orang atau 15,94% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang belum memiliki NPWP, sebanyak 4 orang atau 19,05% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 16orang atau 76,19% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 1 orang atau 4,76% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

g. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tahun Perolehan NPWP

Tabel 5.14 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Tahun Perolehan NPWP

Tahun NPWP \ Skor	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
Sebelum tahun 2006	4	33,33	5	41,67	3	25	12
2006	3	42,86	3	42,86	1	14,28	7
2007	2	22,22	6	66,67	1	11,11	9
2008	2	9,09	17	77,27	3	13,64	22
2009	-	-	17	89,47	2	10,53	19
2010	-	-	-	-	-	-	-
Total	11		48		10		69
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari hasil penghitungan tabel diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan tahun perolehan NPWP. Wajib pajak yang memperoleh NPWP sebelum tahun 2006, sebanyak 3 orang atau 25% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 5 orang atau 41,67% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 4 orang atau 33,33% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang memperoleh NPWP tahun 2006, sebanyak 1 orang atau 14,28% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 3 orang atau 42,86% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 3 orang atau 42,86% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang memperoleh NPWP tahun 2007, sebanyak 1 orang atau 11,11% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 6 orang atau 66,67% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 22,22% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang memperoleh NPWP tahun 2008, sebanyak 3 orang atau 13,64% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh, sebanyak 17 orang atau 77,27% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh dan sebanyak 2 orang atau 9,09% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang patuh.

Wajib pajak yang memperoleh NPWP tahun 2009, sebanyak 2 orang atau 10,53% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat patuh dan sebanyak 17 orang atau 89,47% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup patuh.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data pada sub bab sebelumnya, berikut ini akan diuraikan hasil pembahasan tersebut secara lebih rinci sesuai dengan permasalahannya.

1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan.

Dalam Penilaian Acuan Norma menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dikaitkan dengan mean dan (\bar{X}) dan

standar deviasi (S). Kepatuhan wajib pajak dikatakan cukup patuh apabila minimal jumlah skor yang dimiliki wajib pajak adalah $(\bar{X}) - 1(S)$ atau sebesar 37, maka wajib pajak yang memiliki skor 37 – 52 berarti sudah memenuhi ketentuan perpajakan dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dengan cukup patuh. Sebaliknya apabila wajib pajak memiliki skor dibawah 37 maka wajib pajak tersebut kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Apabila wajib pajak memiliki skor diatas 52 maka wajib pajak tersebut sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah di teliti dan dianalisis berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah penghasilan, kepemilikan NPWP, dan berdasarkan tahun perolehan NPWP.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan usia, untuk usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun sebesar 72% sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan karena memiliki skor 37 – 52 dan dengan skor diatas 52 sebesar 28% sudah sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebagian besar cukup patuh (skor 37 – 52) dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yaitu sebesar 90%, sedangkan 10%-nya dengan tingkat skor dibawah 37 dinilai kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Untuk kelompok usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu sebesar 62,96% dan kelompok usia 51

tahun sampai dengan 60 tahun yaitu sebesar 61,11% sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sebab skor berada diantara 37 – 52. Untuk kelompok usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun (25,93%) kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, sedangkan kelompok usia 51 tahun sampai dengan 60 tahun (22,22%) sudah sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa sebesar 63,64% laki-laki dan sebesar 82,86% perempuan memiliki skor antara 37 – 52 yang berarti bahwa wajib pajak tersebut sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar wajib pajak sudah cukup patuh (skor 37 - 52) dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yaitu wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMP (83,33%), SMA (76,48%), D-3 (71,43%), S-1 (68,18%), S-2 (50%) dan tingkat pendidikan lain-lain (100%), sedangkan wajib pajak yang pendidikan terakhirnya SMA (11,76%), D-3 (7,14%), S-1 (18,18%), dan S-2 (50%) memiliki skor diatas 52 sehingga dapat dinilai bahwa sebagian wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dengan sangat patuh. Untuk tingkat pendidikan SMP (16,67%), SMA (11,76%), D-3 (21,43%) dan S-1 (13,64%) masih kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sebab skor berada dibawah 37.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan pekerjaan, untuk wajib pajak yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 81,82%, karyawan swasta sebesar 82,50%, pensiunan sebesar 75% dan *freelance designer* sebesar 100% sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan karena memiliki skor di antara 37 – 52, berbeda dengan wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta sebesar 43,48% justru kurang patuh (skor dibawah 37) dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Sebagian wajib pajak yang bekerja sebagai PNS (18,18%), karyawan swasta (12,50%), wiraswasta (17,39%) dan pensiunan (25%) yaitu dengan skor diatas 52 sudah sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jumlah penghasilan, sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp1.500.000 sebesar 92,31%, Rp1.500.000 – Rp3.000.000 sebesar 78%, Rp3.000.000 – Rp5.000.000 sebesar 62,50% dan Rp7.000.000 – Rp9.000.000 sebesar 66,67% dengan skor 37 – 52 dinilai sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, sedangkan wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp5.000.000 – Rp7.000.000 sebesar 50% masih kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan karena skor berada dibawah 37. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dengan jumlah penghasilan kurang dari Rp1.500.000 sebesar 7,69%, Rp1.500.000 – Rp3.000.000 sebesar 18%,

Rp3.000.000 – Rp5.000.000 sebesar 6,25% dan Rp5.000.000 – Rp7.000.000 sebesar 37,50% sudah sangat patuh (skor diatas 52), sedangkan sebagian wajib pajak yang kurang patuh adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp1.500.000 – Rp3.000.000 (4%), Rp3.000.000 – Rp5.000.000 (31,25%) dan Rp7.000.000 – Rp9.000.000 (33,33%).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebesar 69,57% dan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebesar 76,19% dengan tingkat skor diantara 37 – 52 dinilai sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tahun perolehan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), wajib pajak yang memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebelum tahun 2006 (41,67%), tahun 2006 (42,86%), tahun 2007 (66,67%), tahun 2008 (77,27%) dan tahun 2009 (89,47%) sudah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dengan tingkat skor 37 – 52, sedangkan wajib pajak yang lain sebagian kurang patuh dan sebagian lagi sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

2. Faktor sikap, kelompok acuan dan kewajiban moral dalam mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Untuk faktor sikap, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan diterima, hal tersebut ditunjukkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t dimana diperoleh hasil $t \text{ hitung} = -2,230 \geq t \text{ tabel} = 1,987$.

Sikap merupakan aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dipengaruhi oleh sikap dari wajib pajak itu sendiri. Hubungan antara sikap dan perilaku ketidakpatuhan pajak adalah negatif, hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki sikap positif (tinggi) maka ketidakpatuhan pajaknya rendah ataupun sebaliknya.

b. Kelompok Acuan (Pengaruh Orang Lain) Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Untuk faktor kelompok acuan (pengaruh orang lain), hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada pengaruh kelompok acuan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

melaksanakan kewajiban pajak penghasilan ditolak atau dengan kata lain tidak ada pengaruh kelompok acuan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan, hal tersebut ditunjukkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t dimana diperoleh hasil $t \text{ hitung} = -0,025 \leq t \text{ tabel} = 1,987$.

Pengaruh kelompok acuan terhadap ketidakpatuhan pajak merupakan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kelompok acuan (orang lain) yang terdiri dari teman, anggota keluarga dan petugas pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

c. Kewajiban Moral Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t diperoleh hasil $t \text{ hitung} = -1,197 \leq t \text{ tabel} = 1,987$ yang berarti bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada pengaruh kewajiban moral terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan ditolak atau dengan kata lain tidak ada pengaruh kewajiban moral terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa moral seseorang tidak mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Wajib pajak

yang memiliki moral yang tinggi dengan wajib pajak yang memiliki moral yang rendah tidak akan mempengaruhi perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal ini adalah ketidakpatuhan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1995. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chang, William. 2000. *Pengantar Teologi Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaputra, Wahyu. 2008. *Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Sudah Diperiksa dan yang Belum Diperiksa*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- . 2008. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/pj./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*.
- . 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Gardia, Trisia dan M. Y. Dedi Haryanto. 2006. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Modus Vol. 18 (1), Maret, Hal. 10-28*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2001. "Kebijakan Pemeriksaan Pajak Perusahaan Pasca Berlakunya UU Perpajakan Baru". *Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 1, No. 5, Desember, Hal. 22-26*.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnandy, Inez Citra. 2007. *Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Di Kawasan Berikat (Studi Deskriptif pada Kawasan Berikat PT GMF Aero Asia)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masidjo. 1995. *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa Di Sekolah*". Yogyakarta: Kanisius
- Mustikasari, Elia. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X (26-28 Juli), Makasar*.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2009. "Kepatuhan Pajak". (online). (<http://www.safri-nurmantu.com>, diakses tanggal 11 November 2009).
- Rosita, Nunung Cahyo. 2010. *Analisis Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Penghasilan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, Wahyu. 2008. "Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)". *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober, Hal. 85-137*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- . 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Murti & Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Penulis Fakultas Psikologi UI. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Walgito, Bimo. 1991. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wismanto, Y. Bagus. 2010. "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku (Kajian Meta Analisis Korelasi)".(online). (<http://www.unika.ac.id>, diakses tanggal 24 Juli 2010).

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian, Kuesioner, dan

Hasil Kuesioner Keseluruhan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Jalan P Senopati 20
 Yogyakarta
 Homepage DJP : [http:// www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telepon (0274) 373403
 Faximile (0274) 380417

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-223/WPJ.23/KP.0201/2010

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mursri Yuniastuti
 NIP : 060047618
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
 Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : Monica Indah Wulandari
 NIM : 062114051
 Program Studi : Fakultas Ekonomi
 Sekolah / Universitas : Universitas Sanata Dharma

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, pada tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan 09 April 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2010

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum

Mursri Yuniastuti
NIP. 060047618

Tembusan :

- Ketua Program Studi
- Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

KATA PENGANTAR

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, pada kesempatan ini memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini.

Adapun judul penelitian saya adalah **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan.**

Hasil penelitian ini hanya untuk kalangan sendiri dan saya berjanji untuk menjamin kerahasiaannya. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian permohonan saya, atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya

(Monica Indah Wulandari)

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : _____(Boleh dikosongkan)
2. Umur : _____Tahun
3. Jenis kelamin

<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
------------------------------------	------------------------------------
4. Pendidikan Terakhir

<input type="checkbox"/> SLTP/SMP	<input type="checkbox"/> Jenjang S-1
<input type="checkbox"/> SLTA/SMA	<input type="checkbox"/> Jenjang S-2S
<input type="checkbox"/> D-3/AKADEMIKA	<input type="checkbox"/> Lain-lain
5. Pekerjaan

<input type="checkbox"/> Pegawai Negri Sipil (PNS)
<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta
<input type="checkbox"/> Wiraswasta
<input type="checkbox"/> Lain-lain,.....
6. Berapakah jumlah penghasilan Bapak/Ibu/Saudara setiap bulannya?

<input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 1.500.000	<input type="checkbox"/> Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000
<input type="checkbox"/> Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 7.000.000 – Rp 9.000.000
<input type="checkbox"/> Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	<input type="checkbox"/> Lebih dari Rp 9.000.000
7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

<input type="checkbox"/> YA	<input type="checkbox"/> TIDAK
-----------------------------	--------------------------------
8. Jika jawaban no. 7 "YA", kapan NPWP tersebut diperoleh?

<input type="checkbox"/> Tahun 2010	<input type="checkbox"/> Tahun 2007
<input type="checkbox"/> Tahun 2009	<input type="checkbox"/> Tahun 2006
<input type="checkbox"/> Tahun 2008	<input type="checkbox"/> Sebelum tahun 2006
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menghendaki ringkasan (abstraksi) hasil penelitian ini?

<input type="checkbox"/> Ya, dialamatkan ke.....
<input type="checkbox"/> Tidak

B. KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama
2. Pastikan anda tidak melewatkan satu nomor pun
3. Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan keadaan Anda.

Alternatif jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

1. Sikap saya jika Wajib Pajak (WP) mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan.

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.				
b. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan.				
c. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.				

2. Sikap saya jika hal-hal berikut ini dipertimbangkan WP dalam keputusannya untuk mematuhi peraturan perpajakan.

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus.				
b. Kemungkinan dikenai sanksi.				
c. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga.				

3. Pihak-pihak berikut ini pernah mendorong saya untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Teman				
b. Anggota keluarga				
c. Petugas pajak				

4. Kewajiban Moral

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika.				
b. Saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak.				
c. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya.				

5. Ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Dalam 2 tahun terakhir saya menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dengan tepat waktu.				
b. Saya selalu menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo.				
c. Saya tidak pernah dikenai sanksi administrasi atau denda oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan SPT Tahunan.				
d. Dalam 2 tahun terakhir saya menyampaikan SPT Masa (bulanan) dengan tepat waktu.				
e. Saya selalu menyampaikan SPT Masa sebelum jatuh tempo.				
f. Saya tidak pernah dikenai sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa.				

6. Tunggakan Pajak dan berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak penghasilan.				
b. Dalam 2 tahun terakhir saya tidak pernah mendapat Surat Tagihan Pajak (STP).				

c. Saya tidak pernah mendapat surat teguran karena surat ketetapan pajak belum dilunasi.				
d. Saya tidak pernah mendapat surat paksa dari Dirjen Pajak.				

7. Tindak Pidana Perpajakan

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Saya tidak pernah dijatuhi hukuman berupa denda pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.				
b. Saya tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan, atau penjara karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.				

8. Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan.				
b. Saya tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang.				

9. Pembetulan SPT

PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
a. Saya mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.				
b. Saya tidak pernah melakukan pembetulan SPT karena kesalahan dalam mengisi SPT.				

”Terima kasih atas partisipasinya”

Hasil Kuesioner Keseluruhan

No	Sikap 1				Sikap 2				Kelompok Acuan				Kewajiban Moral				SPT Tahunan dan Masa						
	1a	1b	1c	Total	2a	2b	2c	Total	3a	3b	3c	Total	4a	4b	4c	Total	5a	5b	5c	5d	5e	5f	Total
1	4	3	3	10	3	2	3	8	2	2	2	6	3	2	2	7	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	2	8	4	4	3	11	4	2	2	4	2	1	15
3	3	4	4	11	3	3	3	9	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	11	3	2	1	3	3	3	15
5	2	2	2	6	3	3	3	9	2	1	1	4	2	1	2	5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	2	8	3	3	3	9	2	2	2	6	3	2	3	8	3	3	3	3	3	3	18
7	2	4	4	10	4	4	4	12	3	3	3	9	3	3	3	9	2	3	2	3	3	3	16
8	2	3	2	7	3	3	2	8	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	2	2	2	15
9	4	4	4	12	4	4	3	11	3	3	2	8	2	4	3	9	3	2	1	2	2	1	11
10	3	4	3	10	2	2	1	5	1	1	1	3	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	24
11	2	2	2	6	3	3	3	9	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	2	8	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
13	4	4	4	12	2	1	1	4	1	1	1	3	2	3	3	8	3	3	3	3	3	3	18
14	2	3	4	9	3	3	3	9	2	3	2	7	1	2	1	4	4	4	2	4	4	4	22
15	3	2	2	7	3	2	3	8	1	1	1	3	2	2	1	5	3	4	3	3	3	2	18
16	4	3	4	11	4	4	3	11	4	4	3	11	3	4	3	10	4	3	2	3	2	2	16
17	4	4	3	11	4	4	4	12	4	4	3	11	3	4	3	10	3	2	2	3	3	2	15
18	4	4	4	12	4	4	3	11	3	4	3	10	4	4	3	11	3	2	2	3	2	2	14
19	3	4	3	10	4	4	3	11	3	3	3	9	4	4	4	12	3	2	2	2	2	2	13
20	3	4	4	11	3	3	3	9	3	3	2	8	3	3	3	9	2	2	3	2	2	3	14
21	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	11	3	1	1	2	1	1	9

22	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	1	7	2	2	2	6	3	3	4	3	3	4	20
23	4	4	3	11	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12	3	2	1	3	2	1	12
24	2	1	2	5	3	3	2	8	1	2	3	6	2	1	1	4	2	4	3	2	4	1	16
25	2	4	4	10	3	4	3	10	3	2	2	7	2	3	2	7	3	3	3	3	3	3	18
26	4	4	4	12	2	3	2	7	1	1	1	3	2	3	3	8	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	11	2	2	2	2	2	2	12
28	3	3	3	9	2	2	2	6	4	3	1	8	3	3	3	9	3	3	2	3	3	2	16
29	4	4	3	11	4	4	4	12	4	3	3	10	3	4	3	10	3	3	2	3	3	3	17
30	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	3	2	2	3	3	3	16
31	4	3	3	10	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	24
32	2	2	2	6	3	3	2	8	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
33	4	3	3	10	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	9	4	4	4	2	4	3	21
34	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
35	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	3	4	3	3	21
36	3	4	4	11	3	4	4	11	4	3	3	10	4	4	4	12	3	3	2	2	2	2	14
37	3	2	4	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	4	4	3	3	3	3	20
38	3	3	2	8	2	2	2	6	4	4	2	10	3	2	3	8	3	3	3	3	3	3	18
39	2	3	4	9	3	3	3	9	3	3	2	8	1	3	1	5	4	4	2	4	4	4	22
40	4	3	2	9	3	3	2	8	3	2	2	7	3	3	3	9	2	2	2	2	2	2	12
41	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	3	11	3	3	3	9	2	2	2	3	3	2	14
42	3	3	2	8	3	3	2	8	3	3	3	9	4	4	4	12	3	2	1	3	3	2	14
43	3	3	3	9	3	2	2	7	2	2	2	6	1	3	1	5	4	4	3	4	4	4	23
44	2	2	2	6	3	3	3	9	1	1	1	3	3	1	1	5	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	2	2	2	2	2	1	11
46	3	4	4	11	3	3	3	9	2	3	3	8	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	12

47	4	3	4	11	4	4	4	12	3	4	3	10	4	3	3	10	3	3	4	4	3	4	21
48	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	1	5	3	4	3	4	3	3	20
49	3	3	2	8	3	3	2	8	1	1	1	3	3	3	2	8	3	2	3	3	2	2	15
50	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	2	2	2	2	1	1	10
51	4	3	3	10	3	2	3	8	2	2	2	6	3	2	2	7	3	3	3	3	3	3	18
52	2	2	2	6	3	3	3	9	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	18
53	2	4	3	9	3	3	2	8	3	3	3	9	4	1	2	7	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	3	9	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	9	2	2	2	2	2	2	12
55	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	2	10	4	4	4	12	2	2	1	2	1	1	9
56	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
57	3	3	3	9	4	4	3	11	3	3	2	8	4	4	3	11	2	2	2	3	3	2	14
58	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	12
59	4	3	3	10	4	4	3	11	4	3	4	11	3	4	4	11	4	3	3	4	3	3	20
60	3	4	4	11	3	4	3	10	3	3	3	9	4	4	4	12	2	2	2	3	3	2	14
61	3	4	4	11	4	4	3	11	4	3	3	10	3	3	3	9	2	2	2	3	3	2	14
62	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
63	3	3	3	9	3	3	3	9	3	2	2	7	2	3	2	7	2	2	3	2	2	3	14
64	4	4	3	11	3	3	3	9	1	1	1	3	1	2	2	5	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	12	3	4	3	10	4	4	3	11	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
66	3	4	4	11	3	4	4	11	4	3	3	10	4	4	3	11	2	2	2	2	2	2	12
67	3	4	4	11	3	4	3	10	4	3	2	9	4	4	4	12	3	2	2	3	2	1	13
68	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	3	3	4	4	3	4	21
69	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	3	3	4	20
70	2	3	3	8	2	3	2	7	3	2	1	6	2	1	2	5	1	1	3	1	1	1	8
71	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	2	10	4	4	3	11	2	2	2	3	3	2	14

72	3	4	3	10	3	4	2	9	2	2	4	8	2	2	2	6	4	4	4	2	2	2	18
73	3	4	3	10	3	4	2	9	2	2	3	7	2	2	2	6	4	4	4	2	2	2	18
74	3	4	4	11	3	4	3	10	3	4	2	9	4	4	3	11	3	3	2	2	2	2	14
75	1	4	3	8	1	3	2	6	2	2	1	5	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	6
76	3	4	3	10	3	3	3	9	3	2	2	7	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
77	3	4	4	11	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
78	2	3	3	8	3	2	2	7	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	4	12	3	4	4	11	4	3	3	10	4	4	4	12	2	3	2	3	2	2	14
80	4	4	4	12	3	4	2	9	4	4	2	10	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
81	2	3	3	8	3	3	3	9	3	3	2	8	2	2	2	6	3	3	3	3	3	2	17
82	2	2	2	6	3	3	3	9	4	2	1	7	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	12
83	2	4	4	10	4	4	2	10	3	4	3	10	4	4	3	11	3	3	3	3	3	3	18
84	3	4	4	11	4	4	3	11	4	4	2	10	4	4	4	12	4	2	2	4	2	2	16
85	3	4	4	11	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	4	12	2	2	2	2	2	2	12
86	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	2	10	4	4	2	10	3	2	2	3	3	2	15
88	3	4	4	11	4	4	3	11	3	4	2	9	4	4	3	11	3	3	3	3	3	3	18
89	2	3	4	9	3	4	3	10	2	3	3	8	4	4	3	11	3	3	3	3	3	3	18
90	3	4	4	11	3	4	3	10	3	4	3	10	3	4	3	10	3	2	2	2	2	1	12

No	Tunggakan Pajak dan STP					Pidana Pajak			Pembayaran Pajak			Pembetulan SPT		
	6a	6b	6c	6d	Total	7a	7b	Total	8a	8b	Total	9a	9b	Total
1	3	3	3	3	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8
2	4	2	2	3	11	4	4	8	4	2	6	4	3	7
3	4	3	3	3	13	3	3	6	4	4	8	4	4	8
4	3	2	2	3	10	3	3	6	3	1	4	3	3	6
5	3	3	3	3	12	4	4	8	3	3	6	3	2	5
6	3	2	2	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6
7	3	2	2	3	10	4	4	8	2	2	4	3	3	6
8	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
9	3	1	1	3	8	3	3	6	2	2	4	3	2	5
10	4	1	4	4	13	4	4	8	4	4	8	4	3	7
11	3	3	3	3	12	3	4	7	3	3	6	4	2	6
12	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
13	3	1	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6
14	4	2	3	4	13	4	4	8	4	4	8	3	3	6
15	3	3	2	3	11	2	2	4	3	3	6	3	3	6
16	3	2	2	3	10	3	4	7	2	2	4	3	3	6
17	3	1	1	2	7	2	3	5	2	2	4	3	2	5
18	3	1	1	1	6	4	4	8	3	2	5	3	3	6
19	3	2	2	3	10	2	3	5	2	2	4	3	3	6
20	3	2	2	3	10	3	3	6	2	2	4	3	2	5
21	3	2	1	2	8	3	4	7	2	2	4	3	2	5
22	3	3	3	3	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6
23	3	1	1	2	7	2	3	5	1	1	2	3	2	5

24	4	2	1	2	9	4	4	8	4	4	8	4	3	7
25	3	2	2	3	10	3	3	6	2	2	4	3	3	6
26	3	2	2	2	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6
27	3	2	1	2	8	4	3	7	2	2	4	3	2	5
28	3	3	3	3	12	3	3	6	4	3	7	3	3	6
29	3	2	3	3	11	3	3	6	2	2	4	4	4	8
30	3	2	3	3	11	3	3	6	2	2	4	3	2	5
31	3	3	3	3	12	4	4	8	4	3	7	4	2	6
32	2	2	2	2	8	2	2	4	3	3	6	3	3	6
33	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
34	3	1	1	2	7	2	3	5	2	2	4	3	3	6
35	2	2	2	2	8	4	3	7	2	2	4	4	2	6
36	4	2	3	3	12	4	4	8	2	2	4	3	3	6
37	3	3	3	3	12	3	3	6	4	3	7	3	3	6
38	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	3	3	6
39	4	2	3	4	13	4	4	8	4	4	8	3	3	6
40	3	4	3	4	14	4	4	8	3	4	7	4	3	7
41	3	2	1	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6
42	3	1	1	3	8	2	3	5	2	2	4	3	3	6
43	4	2	3	4	13	4	4	8	4	4	8	3	3	6
44	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	4	4	8
45	3	1	2	3	9	3	3	6	2	1	3	3	2	5
46	3	2	2	3	10	2	2	4	4	4	8	4	4	8
47	3	3	3	3	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8
48	3	2	3	3	11	2	2	4	3	3	6	3	3	6

49	3	2	2	2	9	3	3	6	3	3	6	3	2	5
50	3	1	2	2	8	3	3	6	2	2	4	3	2	5
51	3	3	3	3	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8
52	3	3	3	3	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8
53	4	4	4	1	13	3	1	4	4	1	5	4	1	5
54	3	3	3	3	12	3	3	6	2	2	4	3	3	6
55	3	1	1	2	7	3	3	6	2	1	3	3	2	5
56	3	1	1	2	7	1	3	4	2	1	3	3	1	4
57	4	2	2	3	11	4	4	8	2	2	4	3	4	7
58	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
59	3	3	4	4	14	3	3	6	4	3	7	3	4	7
60	3	1	2	3	9	3	3	6	3	2	5	3	3	6
61	3	1	2	3	9	3	3	6	2	1	3	3	2	5
62	3	1	1	2	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6
63	3	3	3	3	12	3	3	6	2	3	5	2	3	5
64	4	1	1	1	7	1	1	2	4	1	5	4	1	5
65	4	4	4	3	15	4	3	7	2	2	4	2	2	4
66	3	2	2	2	9	3	3	6	2	2	4	2	2	4
67	3	2	2	3	10	3	3	6	2	2	4	3	3	6
68	3	2	2	3	10	3	3	6	3	2	5	3	3	6
69	3	4	4	3	14	3	3	6	4	3	7	4	4	8
70	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
71	1	2	2	2	7	2	3	5	2	2	4	3	2	5
72	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	4	4	8
73	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	4	4	8

74	3	3	3	3	12	3	3	6	2	2	4	3	3	6
75	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	4	4	8
76	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
77	3	2	3	3	11	3	4	7	2	2	4	3	3	6
78	3	3	3	3	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6
79	3	2	2	3	10	1	3	4	3	2	5	3	3	6
80	3	3	3	3	12	3	3	6	2	2	4	3	3	6
81	3	3	2	2	10	3	3	6	3	2	5	3	2	5
82	3	3	3	3	12	3	3	6	2	3	5	3	2	5
83	3	2	3	3	11	3	3	6	2	2	4	3	3	6
84	3	2	2	4	11	2	4	6	2	4	6	3	4	7
85	3	2	2	2	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6
86	4	4	4	4	16	4	4	8	4	4	8	4	4	8
87	3	2	2	3	10	3	4	7	3	2	5	3	3	6
88	3	2	3	3	11	3	3	6	2	2	4	3	3	6
89	3	2	2	3	10	3	3	6	3	2	5	3	3	6
90	3	1	2	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6

Lampiran 2

**Data Kuesioner Mengenai Tingkat Kepatuhan Pajak,
Perhitungan Deskripsi data dan Kepatuhan Pajak, dan
Tabel Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi**

34	L	44	S1	Wiraswasta	5.000.000-7.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	3	2	2	3	3	34	1156
35	P	28	S1	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2009	4	4	3	4	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	4	2	46	2116
36	P	35	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	S	2008	3	3	2	2	2	2	4	2	3	3	4	4	2	2	3	3	44	1936
37	L	53	D3	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2009	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	51	2601
38	P	25	S1	Wiraswasta	1.500.000-3.000.000	B	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	56	3136
39	L	56	S2	Pensiunan	5.000.000-7.000.000	S	Sebelum 2006	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	3	57	3249
40	P	27	S1	K.Swasta	< 1.500.000	B	-	2	2	2	2	2	2	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	48	2304
41	L	47	S1	Wiraswasta	7.000.000-9.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	2	3	3	2	3	2	1	3	3	3	2	2	3	3	39	1521
42	L	38	S1	K.Swasta	3.000.000-5.000.000	S	Sebelum 2006	3	2	1	3	3	2	3	1	1	3	2	3	2	2	3	3	37	1369
43	L	30	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	B	-	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	3	58	3364
44	L	47	S1	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096
45	L	48	S1	Wiraswasta	5.000.000-7.000.000	S	2006	2	2	2	2	2	1	3	1	2	3	3	3	2	1	3	2	34	1156
46	P	26	S1	Wiraswasta	< 1.500.000	B	-	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	4	4	4	4	42	1764
47	L	29	SMA	K.Swasta	< 1.500.000	B	-	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	55	3025
48	L	31	SMA	K.Swasta	3.000.000-5.000.000	B	-	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	47	2209
49	L	52	SMP	Wiraswasta	< 1.500.000	B	-	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	41	1681
50	L	47	S1	Wiraswasta	7.000.000-9.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	2	2	1	1	3	1	2	2	3	3	2	2	3	2	33	1089
51	L	24	D3	K.Swasta	3.000.000-5.000.000	S	2009	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	52	2704
52	P	46	S1	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2009	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	54	2916
53	L	27	SMA	K.Swasta	< 1.500.000	B	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	1	4	1	4	1	51	2601
54	P	25	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	B	-	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	40	1600
55	L	55	D3	Wiraswasta	5.000.000-7.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	1	2	1	1	3	1	1	2	3	3	2	1	3	2	30	900
56	L	53	SMA	Wiraswasta	5.000.000-7.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	1	3	2	1	3	1	30	900
57	L	34	S2	PNS	3.000.000-5.000.000	S	2008	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	4	44	1936
58	L	42	SMA	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	B	-	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	1764
59	P	22	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	B	-	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	54	2916
60	L	34	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	S	2007	2	2	2	3	3	2	3	1	2	3	3	3	3	2	3	3	40	1600
61	L	41	S1	Wiraswasta	7.000.000-9.000.000	S	Sebelum 2006	2	2	2	3	3	2	3	1	2	3	3	3	2	1	3	2	37	1369
62	P	27	S1	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	S	2009	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	3	3	3	3	3	3	37	1369
63	P	29	S1	K.Swasta	< 1.500.000	B	-	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	42	1764
64	P	56	S2	PNS	3.000.000-5.000.000	S	2009	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	4	1	4	1	43	1849
65	P	30	SMP	K.Swasta	< 1.500.000	B	-	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3	4	3	2	2	2	2	42	1764
66	L	42	SMP	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	B	-	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	35	1225
67	P	38	SMA	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2009	3	2	2	3	2	1	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	39	1521
68	L	40	D3	K.Swasta	1.500.000-3.000.000	S	2008	3	3	4	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	48	2304
69	L	52	S1	PNS	1.500.000-3.000.000	S	2008	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	55	3025

Perhitungan Deskripsi data dan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan rumus:

1. Mean (\bar{x})

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum x}{n} \\ &= \frac{4.023}{90} \\ &= 44,7\end{aligned}$$

2. Deviasi Standar (S)

$$\begin{aligned}s &= \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{1}{90} \sqrt{90(185.109) - (4.023)^2} \\ &= \frac{1}{90} \sqrt{16.659.810 - 16.184.529} \\ &= \frac{1}{90} .689,41 \\ &= 7,66\end{aligned}$$

3. Interval kelas

a. Sangat Patuh $> \bar{x} + 1S$

$$\text{Sangat Patuh} > 44,7 + 1(7,66)$$

$$\text{Sangat Patuh} > 52,43 \text{ dibulatkan menjadi,}$$

$$\text{Sangat Patuh} > 52$$

b. $\bar{x} - 1S < \text{cukup patuh} < \bar{x} + 1S$

$$44,7 - 1(7,66) < \text{cukup patuh} < 44,7 + 1(7,66)$$

$$37,04 < \text{cukup patuh} < 52,43 \text{ dibulatkan menjadi,}$$

$$37 < \text{cukup patuh} < 52$$

c. Kurang Patuh $< \bar{x} - 1S$

$$\text{Kurang Patuh} < 44,7 - 1(7,66)$$

$$\text{Kurang Patuh} < 37,04 \text{ dibulatkan menjadi,}$$

$$\text{Kurang Patuh} < 37$$

**Tabel Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan**

Skor Keterangan	≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%	
Usia:							
20 – 30 tahun	-	-	18	72	7	28	25
31 – 40 tahun	2	10	18	90	-	-	20
41 – 50 tahun	7	25,93	17	62,96	3	11,11	27
51 – 60 tahun	3	16,67	11	61,11	4	22,22	18
Total	12		64		14		90
Jenis Kelamin:							
Laki-laki	10	18,18	35	63,64	10	18,18	55
Perempuan	2	5,71	29	82,86	4	11,43	35
Total	12		64		14		90
Pendidikan:							
SLTP/SMP	1	16,67	5	83,33	-	-	6
SLTA/SMA	2	11,76	13	76,48	2	11,76	17
D-3/Akademika	3	21,43	10	71,43	1	7,14	14
Jenjang S-1	6	13,64	30	68,18	8	18,18	44
Jenjang S-2	-	-	3	50	3	50	6
Lain-lain	-	-	3	100	-	-	3
Total	12		64		14		90
Pekerjaan:							
PNS	-	-	18	81,82	4	18,18	22
Karyawan Swasta	2	5	33	82,50	5	12,50	40
Wiraswasta	10	43,48	9	39,13	4	17,39	23
Lain-Lain:							
- Pensiunan	-	-	3	75	1	25	4
- <i>Freelance Designer</i>	-	-	1	100	-	-	1
Total	12		64		14		90
Penghasilan:							
< Rp1.500.000	-	-	12	92,31	1	7,69	13
Rp1.500.000 – Rp3.000.000	2	4	39	78	9	18	50
Rp3.000.000 – Rp5.000.000	5	31,25	10	62,50	1	6,25	16
Rp5.000.000 – Rp7.000.000	4	50	1	12,50	3	37,50	8
Rp7.000.000 – Rp9.000.000	1	33,33	2	66,67	-	-	3
> Rp9.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Total	12		64		14		90
Kepemilikan NPWP:							
Sudah memiliki NPWP	11	15,94	48	69,57	10	14,49	69
Belum memiliki NPWP	1	4,76	16	76,19	4	19,05	21
Total	12		64		14		90
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh		

Keterangan	Skor		≤ 36		37 – 52		≥ 53		Total
	F	%	F	%	F	%			
Tahun Perolehan NPWP:									
Sebelum tahun 2006	4	33,33	5	41,67	3	25		12	
2006	3	42,86	3	42,86	1	14,28		7	
2007	2	22,22	6	66,67	1	11,11		9	
2008	2	9,09	17	77,27	3	13,64		22	
2009	-	-	17	89,47	2	10,53		19	
2010	-	-	-	-	-	-		-	
Total	11		48		10			69	
Skor dan Penilaian	Kurang Patuh		Cukup Patuh		Sangat Patuh				

Lampiran 3
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden

Frequency Table

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	55	61.1	61.1	61.1
Perempuan	35	38.9	38.9	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 22	2	2.2	2.2	2.2
24	2	2.2	2.2	4.4
25	4	4.4	4.4	8.9
26	3	3.3	3.3	12.2
27	3	3.3	3.3	15.6
28	3	3.3	3.3	18.9
29	5	5.6	5.6	24.4
30	3	3.3	3.3	27.8
31	2	2.2	2.2	30.0
32	2	2.2	2.2	32.2
34	3	3.3	3.3	35.6
35	3	3.3	3.3	38.9
36	1	1.1	1.1	40.0
37	2	2.2	2.2	42.2
38	3	3.3	3.3	45.6
39	2	2.2	2.2	47.8

40	2	2.2	2.2	50.0
41	2	2.2	2.2	52.2
42	2	2.2	2.2	54.4
43	2	2.2	2.2	56.7
44	1	1.1	1.1	57.8
45	4	4.4	4.4	62.2
46	1	1.1	1.1	63.3
47	9	10.0	10.0	73.3
48	2	2.2	2.2	75.6
49	2	2.2	2.2	77.8
50	2	2.2	2.2	80.0
51	1	1.1	1.1	81.1
52	4	4.4	4.4	85.6
53	3	3.3	3.3	88.9
54	4	4.4	4.4	93.3
55	1	1.1	1.1	94.4
56	2	2.2	2.2	96.7
57	1	1.1	1.1	97.8
58	1	1.1	1.1	98.9
59	1	1.1	1.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTP/SMP	6	6.7	6.7	6.7
SLTA/SMA	17	18.9	18.9	25.6
D-3	14	15.6	15.6	41.1
S-1	44	48.9	48.9	90.0
S-2	6	6.7	6.7	96.7
lain-lain	3	3.3	3.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	22	24.4	24.4	24.4
Karyawan Swasta	40	44.4	44.4	68.9
Wiraswasta	23	25.6	25.6	94.4
Lain-lain	5	5.6	5.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Jumlah Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1.500.000	13	14.4	14.4	14.4
1.500.000 - 3.000.000	50	55.6	55.6	70.0
3.000.000 - 5.000.000	16	17.8	17.8	87.8
5.000.000 - 7.000.000	8	8.9	8.9	96.7
7.000.000 - 9.000.000	3	3.3	3.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

NPWP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sudah	69	76.7	76.7	76.7
Belum	21	23.3	23.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Tahun Perolehan NPWP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak ber-NPWP	21	23.3	23.3	23.3
Sebelum thn 2006	12	13.3	13.3	36.7
2006	7	7.8	7.8	44.4
2007	9	10.0	10.0	54.4
2008	22	24.4	24.4	78.9
2009	19	21.1	21.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Lampiran 4
Hasil Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan
Analisis Regresi Berganda

Uji Validitas

Correlations

		1a	1b	1c	Sikap 1
1a	Pearson Correlation	1	.472**	.406**	.766**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90
1b	Pearson Correlation	.472**	1	.720**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90
1c	Pearson Correlation	.406**	.720**	1	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90
Sikap 1	Pearson Correlation	.766**	.872**	.850**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		2a	2b	2c	Sikap 2
2a	Pearson Correlation	1	.727**	.645**	.894**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90
2b	Pearson Correlation	.727**	1	.604**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90
2c	Pearson Correlation	.645**	.604**	1	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90
Sikap 2	Pearson Correlation	.894**	.888**	.854**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		3a	3b	3c	Kelp. Acuan
3a	Pearson Correlation	1	.840**	.534**	.907**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90
3b	Pearson Correlation	.840**	1	.639**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90
3c	Pearson Correlation	.534**	.639**	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90
Kelp. Acuan	Pearson Correlation	.907**	.942**	.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		4a	4b	4c	Kewajiban Moral
4a	Pearson Correlation	1	.750**	.809**	.920**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90
4b	Pearson Correlation	.750**	1	.804**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90
4c	Pearson Correlation	.809**	.804**	1	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90
Kewajiban Moral	Pearson Correlation	.920**	.921**	.939**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		5a	5b	5c	5d	5e	5f	SPT Tahunan- Masa
5a	Pearson Correlation	1	.709**	.490**	.693**	.566**	.547**	.793**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
5b	Pearson Correlation	.709**	1	.716**	.580**	.744**	.672**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
5c	Pearson Correlation	.490**	.716**	1	.414**	.558**	.674**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
5d	Pearson Correlation	.693**	.580**	.414**	1	.730**	.672**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
5e	Pearson Correlation	.566**	.744**	.558**	.730**	1	.766**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
5f	Pearson Correlation	.547**	.672**	.674**	.672**	.766**	1	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SPT Tahunan- Masa	Pearson Correlation	.793**	.883**	.776**	.809**	.870**	.873**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		6a	6b	6c	6d	Tunggakan Pajak
6a	Pearson Correlation	1	.262*	.360**	.355**	.544**
	Sig. (2-tailed)		.013	.000	.001	.000
	N	90	90	90	90	90
6b	Pearson Correlation	.262*	1	.769**	.425**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.013		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90
6c	Pearson Correlation	.360**	.769**	1	.624**	.923**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90
6d	Pearson Correlation	.355**	.425**	.624**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90
Tunggakan Pajak	Pearson Correlation	.544**	.847**	.923**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		7a	7b	Pidana Pajak
7a	Pearson Correlation	1	.658**	.923**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	90	90	90
7b	Pearson Correlation	.658**	1	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	90	90	90
Pidana Pajak	Pearson Correlation	.923**	.897**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		8a	8b	Pembayaran Pajak
8a	Pearson Correlation	1	.686**	.911**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	90	90	90
8b	Pearson Correlation	.686**	1	.925**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	90	90	90
Pembayaran Pajak	Pearson Correlation	.911**	.925**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		9a	9b	Pembetulan SPT
9a	Pearson Correlation	1	.326**	.723**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000
	N	90	90	90
9b	Pearson Correlation	.326**	1	.889**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000
	N	90	90	90
Pembetulan SPT	Pearson Correlation	.723**	.889**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Analysis (Spearman-Brown)

Correlations

		GANJIL	GENAP
GANJIL	Pearson Correlation	1	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	90	90
GENAP	Pearson Correlation	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis Regresi Linear Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Ketidapatuhan_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.235	.208	6.854

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1241.321	3	413.774	8.809	.000 ^a
	Residual	4039.579	86	46.972		
	Total	5280.900	89			

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

b. Dependent Variable: Ketidapatuhan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	64.678	4.533		14.268	.000
	Sikap	-.785	.352	-.335	-2.230	.028
	Kelp.Acuan	-.011	.448	-.004	-.025	.980
	Kew.Moral	-.509	.426	-.180	-1.197	.235

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Lampiran 5

**Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Multikolonieritas,
Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas**

Uji Multikolonieritas

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Ketidapatuhan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.235	.208	6.854

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1241.321	3	413.774	8.809	.000 ^a
	Residual	4039.579	86	46.972		
	Total	5280.900	89			

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

b. Dependent Variable: Ketidapatuhan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	64.678	4.533		14.268	.000		
Sikap	-.785	.352	-.335	-2.230	.028	.394	2.537
Kelp.Acuan	-.011	.448	-.004	-.025	.980	.426	2.347
Kew.Moral	-.509	.426	-.180	-1.197	.235	.395	2.532

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Coefficient Correlations^a

Model		Kew_Moral	Kelp_Acuan	Sikap
1	Correlations			
	Kew.Moral	1.000	-.391	-.465
	Kelp.Acuan	-.391	1.000	-.393
	Sikap	-.465	-.393	1.000
1	Covariances			
	Kew.Moral	.181	-.074	-.070
	Kelp.Acuan	-.074	.201	-.062
	Sikap	-.070	-.062	.124

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.73710047
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		.308

a. Test distribution is Normal.

Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.235	.208	6.854

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

b. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1241.321	3	413.774	8.809	.000 ^a
	Residual	4039.579	86	46.972		
	Total	5280.900	89			

a. Predictors: (Constant), Kew.Moral, Kelp.Acuan, Sikap

b. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64.678	4.533		14.268	.000
Sikap	-.785	.352	-.335	-2.230	.028
Kelp.Acuan	-.011	.448	-.004	-.025	.980
Kew.Moral	-.509	.426	-.180	-1.197	.235

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	39.58	52.64	44.70	3.735	90
Std. Predicted Value	-1.371	2.126	.000	1.000	90
Standard Error of Predicted Value	.760	3.384	1.384	.416	90
Adjusted Predicted Value	39.22	53.14	44.66	3.772	90
Residual	-12.282	23.622	.000	6.737	90
Std. Residual	-1.792	3.447	.000	.983	90
Stud. Residual	-1.828	3.496	.002	1.011	90
Deleted Residual	-12.783	24.301	.036	7.144	90
Stud. Deleted Residual	-1.854	3.752	.008	1.028	90
Mahal. Distance	.106	20.715	2.967	2.881	90
Cook's Distance	.000	.399	.016	.045	90
Centered Leverage Value	.001	.233	.033	.032	90

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Pajak

Scatterplot

